BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pendidikan merupakan hak dasar setiap warga negara yang dijamin oleh konstitusi. Dalam Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditegaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pendidikan tidak hanya dipandang sebagai kebutuhan individual, tetapi juga sebagai hak konstitusional yang wajib dipenuhi oleh negara. Dalam perspektif negara kesejahteraan (*welfare state*), pemerintah memiliki tanggung jawab tidak hanya sebagai regulator, tetapi juga sebagai penyedia layanan pendidikan yang adil, merata, dan inklusif bagi seluruh masyarakat tanpa diskriminasi (Putra, 2021).

Pendidikan merupakan salah satu faktor penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia suatu bangsa karena SDM yang unggul terbentuk dari nilai-nilai pendidikan yang tertanam dalam masyarakat serta berperan dalam membentuk karakter dan kemampuan individu agar mampu bersaing di tingkat global (Dihe & Wangdra, 2023). Penyelenggaraan pendidikan di Indonesia memiliki cakupan yang luas dan terstruktur, meliputi berbagai jalur, jenjang, dan jenis pendidikan. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, khususnya Pasal 13 ayat 1, yang menyatakan bahwa jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, nonformal, dan informal yang saling melengkapi dan memperkaya. Selanjutnya, pada Pasal 14

dijelaskan bahwa jenjang pendidikan formal terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.

Pendidikan dasar mencakup Sekolah Dasar (SD) atau Madrasah Ibtidaiyah (MI) serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau Madrasah Tsanawiyah (MTs). Pendidikan menengah meliputi Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), maupun Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Sementara itu, pendidikan tinggi mencakup program diploma, sarjana, magister, doktor, profesi, dan spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa sistem pendidikan di Indonesia dirancang secara komprehensif guna menjamin keberlangsungan proses pendidikan sejak usia dini hingga tingkat lanjutan.

Pendidikan tinggi menjadi jenjang strategis karena berperan dalam mencetak tenaga profesional, menghasilkan sumber daya manusia yang kompeten, serta mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi guna mendukung pembangunan nasional. Hal ini sejalan dengan pernyataan Bapak Brian Yuliarto selaku Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) yang menyampaikan bahwa pendidikan tinggi adalah fondasi utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis pengetahuan (Kemdiktisaintek, 2025). Melalui pendidikan tinggi, seseorang juga memperoleh peluang yang lebih besar untuk meningkatkan mobilitas sosial, memperluas akses terhadap lapangan pekerjaan yang lebih baik, serta meningkatkan taraf kesejahteraan hidup (Arifin, 2017). Di samping itu, perguruan tinggi memiliki fungsi penting sebagai pusat riset, inovasi, dan pengembangan ilmu pengetahuan yang sangat dibutuhkan dalam menghadapi

persaingan global dan dinamika perkembangan zaman (Kemdiktisaintek, 2025). Dengan demikian, pemerataan akses terhadap pendidikan tinggi menjadi aspek yang sangat penting agar seluruh lapisan masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang, sekaligus mewujudkan keadilan sosial serta meningkatkan daya saing bangsa.

Namun demikian, realita menunjukkan bahwa akses terhadap pendidikan tinggi di Indonesia masih menghadapi berbagai ketimpangan, terutama antara wilayah Indonesia bagian barat dan wilayah Indonesia bagian timur. Ketimpangan tersebut dapat dilihat melalui beberapa indikator, antara lain Angka Partisipasi Kasar (APK) perguruan tinggi, persebaran mahasiswa berdasarkan wilayah, kondisi ekonomi keluarga, ketersediaan dan keterjangkauan perguruan tinggi, serta dukungan infrastruktur pendidikan dan tenaga pendidik (Ma'rifatunnisa, 2025). Wilayah barat Indonesia, khususnya Pulau Jawa, memiliki keunggulan dalam hal jumlah perguruan tinggi, fasilitas pendidikan, serta jumlah tenaga pengajar. Sebaliknya, wilayah timur Indonesia, khususnya wilayah Papua, masih menghadapi berbagai keterbatasan dalam hal infrastruktur pendidikan, akses geografis, serta kualitas layanan pendidikan (Firdaus, 2025). Hal ini sejalan dengan data Badan Pusat Statistik tahun 2025 mengenai sebaran jumlah perguran tinggi, dosen, dan mahasiswa (negeri dan swasta) di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, sebagai berikut.

Tabel 1.1 Jumlah Perguruan Tinggi, Dosen dan Mahasiswa (Negeri dan Swasta) di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) menurut Provinsi di Pulau Jawa dan Papua, tahun 2025

Provinsi	Jumlah					
	PTN	PTS	Dosen di PTN	Dosen di PTS	Mahasiswa di PTN	Mahasiswa di PTS
DKI Jakarta	4	237	4.774	24.179	132.876	666.502
Jawa Barat	12	348	9.304	22.112	244.768	671.153
Jawa Tengah	9	228	7.973	14.454	278.175	485.361
DI Yogyakarta	5	101	5.550	7.915	171.712	267.524
Jawa Timur	17	318	13.511	21.090	437.959	591.212
Banten	2	94	3.412	3.832	1.657.906	226.927
Papua Barat	2	10	656	226	15.172	8.440
Papua Barat Daya	-	12	-	720	-	24.359
Papua	2	27	1.023	905	49.465	25.393
Papua Selatan	1	7	450	98	19.060	3.347
Papua Tengah	-	13	-	265	-	6.185
Papua Pegunungan	-	8	-	210	-	8.302

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan bahwa ketimpangan akses pendidikan masih terjadi secara signifikan, terutama antara wilayah Jawa dan Papua. Dari sisi jumlah perguruan tinggi, Jawa Barat memiliki 360 perguruan tinggi yang terdiri atas 12 PTN dan 348 PTS, sedangkan Jawa Timur memiliki 335 perguruan tinggi yang terdiri atas 17 PTN dan 318 PTS. Sebaliknya, Papua Pegunungan hanya memiliki 8 perguruan tinggi (PTS) dan Papua Selatan sebanyak 8 perguruan tinggi yang terdiri dari 1 PTN dan 7 PTS. Ketimpangan juga terlihat dari jumlah tenaga dosen, di mana Jawa Timur memiliki 34.601 dosen dan Jawa Barat sebanyak 31.416 dosen, sementara Papua Pegunungan hanya memiliki 210 dosen dan Papua Tengah 265 dosen. Dari sisi jumlah mahasiswa, Provinsi Banten menempati angka tertinggi dengan 1.884.833 mahasiswa, disusul Jawa Timur

sebanyak 1.029.171 mahasiswa. Sebaliknya, Papua Tengah hanya memiliki 6.185 mahasiswa dan Papua Pegunungan sebanyak 8.302 mahasiswa.

Perbedaan yang sangat mencolok tersebut menunjukkan bahwa ketersediaan institusi pendidikan tinggi, tenaga pengajar, dan daya tampung mahasiswa masih terpusat di wilayah barat khususnya pulau Jawa. Sedangkan wilayah timur Indonesia masih mengalami keterbatasan akses pendidikan tinggi. Kondisi ini tidak hanya tercermin dari sarana pendidikan yang tersedia, tetapi juga dapat dilihat lebih lanjut melalui rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam menempuh pendidikan tinggi yang diukur melalui Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi.

Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat partisipasi penduduk dalam mengakses pendidikan tinggi pada jenjang diploma maupun sarjana. APK dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah seluruh mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan tinggi, tanpa memandang batas usia, dengan jumlah penduduk pada kelompok usia resmi perguruan tinggi (19-23 tahun), kemudian dinyatakan dalam bentuk persentase (Badan Pusat Statistik, 2026). Indikator ini penting digunakan untuk melihat sejauh mana kesempatan masyarakat dalam memperoleh akses ke pendidikan tinggi di suatu wilayah. Semakin tinggi nilai APK, maka semakin besar pula tingkat keterjangkauan masyarakat terhadap layanan pendidikan tinggi. Sebaliknya, nilai APK yang rendah menunjukkan masih terbatasnya akses masyarakat untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi.

Tabel 1. 2 Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi menurut Provinsi di Pulau Papua, Tahun 2023-2025

No.	Provinsi	APK PT 2023	APK PT 2024	APK PT 2025
1.	Papua Barat	33,89%	27,52%	27,99%
2.	Papua Barat Daya	-	36,71%	38,22%
3.	Papua	19,99%	35,63%	34,08%
4.	Papua Selatan	-	25,07%	24,15%
5.	Papua Tengah	-	15,45%	13,62%
6.	Papua Pegunungan	-	12,23%	13,34%
7.	Indonesia (Nasional)	31,45%	32,00%	32,89%

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi secara nasional dalam tiga tahun terakhir menunjukkan tren peningkatan, yaitu sebesar 31,45% pada tahun 2023, meningkat menjadi 32,00% pada tahun 2024, dan kembali naik menjadi 32,89% pada tahun 2025. Capaian APK nasional pada tahun 2025 tersebut berarti bahwa dari setiap 100 penduduk usia kuliah (19-23 tahun), sekitar 33 orang sedang menempuh pendidikan tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa secara nasional akses masyarakat terhadap pendidikan tinggi terus mengalami perkembangan positif. Namun demikian, apabila dibandingkan dengan beberapa provinsi di Pulau Papua, kesenjangan akses pendidikan tinggi masih terlihat cukup signifikan. Pada tahun 2025, Papua Pegunungan memiliki APK terendah sebesar 13,34%, disusul Papua Tengah sebesar 13,62%, serta Papua Selatan sebesar 24,15%, yang seluruhnya masih berada di bawah rata-rata nasional. Sementara itu, Papua Barat Daya dan Papua mencatat APK tertinggi di kawasan Papua, yaitu sebesar 38,22% dan 34,08%, bahkan melampaui angka nasional. Jika dilihat dalam periode 2023-2025, beberapa provinsi di Papua menunjukkan fluktuasi capaian APK, sehingga menandakan

bahwa peningkatan akses pendidikan tinggi di wilayah tersebut belum berlangsung secara stabil dan merata. Kondisi ini menunjukkan bahwa masih banyak penduduk usia kuliah di Papua yang belum memperoleh kesempatan melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi. Oleh karena itu, ketimpangan APK tersebut menjadi indikator penting bahwa pemerataan akses pendidikan tinggi di kawasan Papua masih memerlukan perhatian dan intervensi kebijakan yang berkelanjutan.

Ketimpangan akses pendidikan tinggi tersebut tidak hanya berdampak pada rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam melanjutkan studi ke perguruan tinggi, tetapi juga menimbulkan berbagai konsekuensi lain, seperti terbatasnya kesempatan peningkatan kualitas sumber daya manusia, menyempitnya peluang memperoleh pekerjaan yang layak, rendahnya mobilitas sosial, serta semakin lebarnya kesenjangan pembangunan antarwilayah (Syahputra & Khasanah, 2025). Dampak tersebut cenderung lebih dirasakan oleh kelompok masyarakat yang menghadapi hambatan geografis, ekonomi, sosial, dan kultural dalam mengakses pendidikan, salah satunya adalah mahasiswa Orang Asli Papua (OAP) (Situmorang, 2025).

Mahasiswa Orang Asli Papua (OAP) adalah sebutan bagi mahasiswa yang berasal dari kelompok penduduk asli di wilayah Papua dan memperoleh pengakuan sebagai bagian dari masyarakat adat Papua, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua yang kemudian diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 (Effendy, 2023). Mahasiswa OAP umumnya berasal dari wilayah yang memiliki keterbatasan sarana pendidikan, jarak tempuh yang jauh, serta tantangan adaptasi ketika

melanjutkan studi di luar daerah asalnya (Adriana et al., 2025). Kondisi tersebut menyebabkan mahasiswa OAP membutuhkan dukungan kebijakan yang lebih besar agar memiliki kesempatan yang setara dalam mengakses dan menyelesaikan pendidikan tinggi.

Mahasiswa OAP menjadi salah satu kelompok sasaran berbagai kebijakan afirmatif pemerintah yang bertujuan untuk memperluas akses dan meningkatkan keberhasilan studi di perguruan tinggi (Mendila et al., 2025). Namun demikian, mahasiswa OAP yang melanjutkan pendidikan di luar daerah sering dihadapkan pada berbagai tantangan, seperti perbedaan budaya, bahasa, lingkungan sosial, serta sistem pendidikan yang berbeda dengan daerah asalnya (Yunita et al., 2024). Perbedaan tersebut menuntut kemampuan adaptasi yang cepat, baik dalam kehidupan sosial maupun dalam proses akademik di perguruan tinggi. Dalam penelitian Azman & Suryandari (2022) mengatakan bahwa mahasiswa asal Papua cenderung memiliki rasa kurang percaya diri dalam bergaul dan berinteraksi dengan mahasiswa dari daerah lain maupun masyarakat sekitar sehingga mereka bersikap lebih tertutup dan pada akhirnya lebih memilih untuk berinteraksi serta berkumpul dengan sesama mahasiswa yang berasal dari Papua saja. Mahasiswa yang tidak mampu beradaptasi dengan baik cenderung mengalami kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran, sehingga meningkatkan risiko kegagalan studi yang pada akhirnya dapat berujung pada terjadinya fenomena putus studi di pendidikan tinggi (Rahmadani & Rahmawati, 2020).

Fenomena putus studi merupakan indikator penting dalam menilai keberhasilan suatu sistem pendidikan. Putus studi tidak hanya mencerminkan

kegagalan individu dalam menyelesaikan pendidikan, melainkan juga menunjukkan adanya permasalahan dalam sistem pendidikan itu sendiri (Widyastuti, 2021). Permasalahan tersebut dapat berasal dari berbagai faktor, baik internal maupun eksternal, seperti kemampuan akademik, kondisi ekonomi, dukungan sosial, serta efektivitas kebijakan pendidikan.

Pemerintah menghadirkan berbagai program afirmatif di bidang pendidikan tinggi sebagai bentuk intervensi kebijakan untuk mendorong pemerataan akses pendidikan, seperti Program Beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi (Adik) dan KIP Kuliah. Program-program tersebut bertujuan untuk meningkatkan akses pendidikan tinggi bagi masyarakat kurang mampu, khususnya di wilayah 3T dan Papua. Namun demikian, pendekatan yang berfokus pada aspek pembiayaan dinilai belum sepenuhnya mampu menjawab permasalahan yang dihadapi mahasiswa, khususnya dalam aspek adaptasi dan keberlanjutan studi (Mendila et al., 2025). Oleh karena itu, pemerintah kemudian menghadirkan pendekatan yang lebih komprehensif melalui Program Beasiswa Asrama Mahasiswa Nusantara (AMN) yang tidak hanya memberikan dukungan finansial, tetapi juga menyediakan fasilitas hunian, pembinaan akademik, dan karakter bagi mahasiswa.

Program Beasiswa Asrama Mahasiswa Nusantara (AMN) adalah kebijakan afirmatif yang bersifat lebih komprehensif. Secara historis, inisiatif pembangunan Asarama Mahasiswa Nusantara (AMN) pertama kali muncul dari usulan 61 tokoh Papua dan Papua Barat kepada Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo pada 10 September 2019 di Istana Negara. Asrama Mahasiswa Nusantara (AMN) kemudian direalisasikan dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2021 tentang

Asrama Mahasiswa Nusantara (AMN Surabaya, 2024). Regulasi ini menegaskan bahwa AMN dibentuk sebagai wadah untuk mempersatukan mahasiswa dari berbagai latar belakang dalam satu lingkungan yang terintegrasi. Selain itu, pengelolaan AMN juga diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 35 Tahun 2022 yang menegaskan bahwa program ini mencakup pembinaan mahasiswa secara komprehensif. Hingga saat ini, pembentukan Asrama Mahasiswa Nusantara (AMN) telah berjalan di dua lokasi, yaitu AMN Surabaya yang mulai beroperasi sejak tahun 2022 dan AMN Manado yang mulai berjalan pada tahun 2025.



Gambar 1.1 Asrama Mahasiswa Nusantara (AMN) Surabaya
Sumber: *Website* Asrama Mahasiswa Nusantara (AMN) Surabaya

Pada penelitian ini, lokus penelitian yang dipilih adalah Asrama Mahasiswa Nusantara (AMN) Surabaya. Asrama Mahasiswa Nusantara (AMN) Surabaya merupakan salah satu implementasi awal Program Beasiswa Asrama Mahasiswa Nusantara pertama yang diresmikan langsung oleh Bapak Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan beroperasi pada tahun 2022, berlokasi di kawasan Siwalankerto, Kecamatan Wonocolo, Kota Surabaya. Program Beasiswa Asrama

Mahasiswa Nusantara (AMN) Surabaya dibentuk dengan tujuan untuk mewadahi mahasiswa baru semester 1 dari berbagai daerah di Indonesia, mulai dari Sabang sampai Merauke, yang sedang menempuh pendidikan tinggi di Kota Surabaya. Kehadiran AMN Surabaya menjadi sarana pemerataan akses pendidikan tinggi sekaligus ruang pembinaan generasi muda dari beragam latar belakang suku, budaya, dan daerah dalam satu lingkungan yang inklusif. Dalam pelaksanaannya, AMN Surabaya bekerja sama dengan empat perguruan tinggi negeri terkemuka di Kota Surabaya, yaitu Universitas Airlangga (Unair), Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Universitas Negeri Surabaya (Unesa), dan Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur sebagai mitra penyelenggara pendidikan bagi para mahasiswa penerima program.

Salah satu ketentuan bagi mahasiswa penerima beasiswa AMN adalah wajib mengikuti program hunian di asrama selama dua tahun atau empat semester perkuliahan sebagai bagian dari proses pembinaan karakter, kedisiplinan, kebangsaan, serta pendampingan akademik, dan setelah masa tersebut mahasiswa diperkenankan untuk keluar dari asrama. AMN Surabaya diresmikan pada tanggal 29 November 2022 dan sejak mulai beroperasi hingga tahun 2025 tercatat telah memiliki sebanyak 736 mahasiswa aktif dari total penerima program periode 2022-2025.

Tabel 1.3 Jumlah Penerima Beasiswa AMN Surabaya Berdasarkan Perguruan Tinggi Mitra 2022-2025

Tahun	Jumlah	Perguruan Tinggi Mitra			
		UPN VJT	UNESA	ITS	UNAIR
2022	407	170	114	64	59
2023	27	10	10	3	4
2024	131	38	34	30	29
2025	248	62	61	63	62
Total	813	280	219	160	154

Sumber: Asrama Mahasiswa Nusantara (AMN) Surabaya, 2025

Berdasarkan tabel di atas, jumlah penerima beasiswa Asrama Mahasiswa Nusantara (AMN) Surabaya periode 2022-2025 menunjukkan dinamika penerimaan mahasiswa pada empat perguruan tinggi mitra, yaitu UPN "Veteran" Jawa Timur, Universitas Negeri Surab aya, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, dan Universitas Airlangga. Pada tahun 2022 sebagai angkatan pertama, jumlah penerimaan tercatat paling besar yaitu 407 mahasiswa yang tersebar di UPN "Veteran" Jawa Timur sebanyak 170 mahasiswa, Universitas Negeri Surabaya 114 mahasiswa, Institut Teknologi Sepuluh Nopember 64 mahasiswa, dan Universitas Airlangga 59 mahasiswa.

Pada tahun 2023, jumlah penerimaan mengalami penurunan menjadi 27 mahasiswa, yang terdiri atas 10 mahasiswa di UPN "Veteran" Jawa Timur, 10 mahasiswa di Universitas Negeri Surabaya, 3 mahasiswa di Institut Teknologi Sepuluh Nopember, dan 4 mahasiswa di Universitas Airlangga. Penurunan ini disebabkan oleh kebijakan program Beasiswa AMN yang mewajibkan penerima tinggal di asrama selama dua tahun atau empat semester, sehingga penerimaan pada periode tersebut difokuskan untuk mengisi kekosongan tempat akibat masih ditempatinya asrama oleh angkatan sebelumnya.

Selanjutnya, pada tahun 2024 jumlah penerimaan meningkat menjadi 131 mahasiswa, dengan rincian 38 mahasiswa di UPN “Veteran” Jawa Timur, 34 mahasiswa di Universitas Negeri Surabaya, 30 mahasiswa di Institut Teknologi Sepuluh Nopember, dan 29 mahasiswa di Universitas Airlangga. Kemudian pada tahun 2025, jumlah penerimaan kembali meningkat menjadi 248 mahasiswa yang terdiri atas 62 mahasiswa di UPN “Veteran” Jawa Timur, 61 mahasiswa di Universitas Negeri Surabaya, 63 mahasiswa di Institut Teknologi Sepuluh Nopember, dan 62 mahasiswa di Universitas Airlangga. Secara keseluruhan, total penerimaan mahasiswa penerima Beasiswa AMN Surabaya selama periode 2022-2025 berjumlah 813 mahasiswa.

Program Asrama Mahasiswa Nusantara (AMN) Surabaya dirancang secara komprehensif dengan menyediakan berbagai fasilitas bagi mahasiswa penerima, seperti beasiswa pendidikan hingga delapan semester, dana bulanan (*living allowance*), tunjangan buku setiap semester, bantuan dana tugas akhir, fasilitas asrama yang lengkap, serta tunjangan BPJS. Selain itu, program ini juga dilengkapi dengan berbagai program pembinaan yang mencakup pendidikan karakter, pengembangan soft skills, kepemimpinan, kewirausahaan, serta layanan bimbingan akademik dan konseling. Secara ideal, seluruh fasilitas dan program pembinaan tersebut diharapkan mampu mendukung keberhasilan studi mahasiswa, khususnya mahasiswa Orang Asli Papua (OAP). Program ini tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan finansial, tetapi juga memberikan pendampingan secara holistik yang mencakup aspek akademik, sosial, dan psikologis mahasiswa

Tabel 1.4 Jumlah Mahasiswa Putus Studi AMN Surabaya 2022-2025

Tahun	Jumlah	Putus Studi		Eksisting
2022	407	66	16,22%	341
2023	27	1	3,70%	26
2024	131	10	7,63%	121
2025	248	0	0,00%	248
Total	813	77	9,47%	736

Sumber: Asrama Mahasiswa Nusantara (AMN) Surabaya, 2025

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui kondisi keberlanjutan studi mahasiswa penerima Beasiswa AMN Surabaya periode 2022-2025 yang ditinjau dari jumlah mahasiswa putus studi dan mahasiswa yang masih aktif. Pada tahun 2022, dari 407 mahasiswa terdapat 66 mahasiswa yang mengalami putus studi atau sebesar 16,22%, sedangkan 341 mahasiswa masih berstatus aktif.

Pada tahun 2023, angka putus studi menurun menjadi 1 mahasiswa atau 3,70%, dengan 26 mahasiswa masih aktif. Selanjutnya pada tahun 2024 terdapat 10 mahasiswa yang mengalami putus studi atau 7,63% dari 131 mahasiswa, sedangkan 121 mahasiswa masih aktif. Sementara itu, pada tahun 2025 tidak terdapat mahasiswa yang mengalami putus studi, sehingga seluruh 248 mahasiswa masih berstatus aktif.

Secara keseluruhan, selama periode 2022-2025 terdapat 77 mahasiswa yang mengalami putus studi atau sebesar 9,47%, sedangkan 736 mahasiswa masih bertahan dan berstatus aktif. Namun demikian, meskipun Program AMN Surabaya telah dilengkapi dengan berbagai fasilitas dan program pembinaan yang komprehensif, masih ditemukan fenomena putus studi pada mahasiswa penerima program tersebut khususnya pada mahasiswa Orang Asli Papua (OAP).

Tabel 1.5 Jumlah Mahasiswa OAP Putus Studi Berdasarkan Perguruan Tinggi Mitra AMN Surabaya 2022-2025

Tahun	Jumlah	Putus Studi	Perguruan Tinggi Mitra			
			UPN "Veteran" Jawa Timur	Universitas Negeri Surabaya	Institut Teknologi Sepuluh Nopember	Universitas Airlangga
2022	163	61	32	19	6	4
2023	0	0	0	0	0	0
2024	43	7	5	1	1	0
2025	75	0	0	0	0	0
Total	281	68	37	20	7	4

Sumber: Asrama Mahasiswa Nusantara (AMN) Surabaya, 2025

Berdasarkan tabel di atas, ditemukan adanya fenomena putus studi meskipun Program AMN Surabaya telah menyediakan berbagai manfaat dan dukungan yang komprehensif bagi mahasiswa. Pada tahun 2022 sebagai angkatan pertama, dari total 163 mahasiswa OAP yang diterima, sebanyak 61 mahasiswa mengalami putus studi. Jika ditinjau berdasarkan perguruan tinggi mitra, mahasiswa putus studi paling banyak berasal dari UPN "Veteran" Jawa Timur sebanyak 32 mahasiswa, diikuti Universitas Negeri Surabaya sebanyak 19 mahasiswa, Institut Teknologi Sepuluh Nopember sebanyak 6 mahasiswa, dan Universitas Airlangga sebanyak 4 mahasiswa.

Pada tahun 2023 tidak terdapat penerimaan mahasiswa OAP baru sehingga tidak terdapat data putus studi pada tahun tersebut. Selanjutnya, pada tahun 2024 dari total 43 mahasiswa OAP yang diterima, sebanyak 7 mahasiswa mengalami putus studi, yang terdiri atas 5 mahasiswa dari UPN "Veteran" Jawa Timur, 1 mahasiswa dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember, dan 1 mahasiswa dari Universitas Negeri Surabaya, sedangkan Universitas Airlangga tidak terdapat

mahasiswa yang mengalami putus studi. Pada tahun 2025 jumlah penerimaan meningkat menjadi 75 mahasiswa dan seluruhnya masih berstatus aktif tanpa adanya putus studi.

Secara keseluruhan, dari total 281 mahasiswa OAP penerima Program AMN Surabaya selama periode 2022-2025, terdapat 68 mahasiswa yang mengalami putus studi. Berdasarkan perguruan tinggi mitra, jumlah putus studi tertinggi terjadi di UPN "Veteran" Jawa Timur sebanyak 37 mahasiswa, diikuti Universitas Negeri Surabaya sebanyak 20 mahasiswa, Institut Teknologi Sepuluh Nopember sebanyak 7 mahasiswa, dan Universitas Airlangga sebanyak 4 mahasiswa. Tingginya angka putus studi mahasiswa OAP di UPN "Veteran" Jawa Timur menunjukkan bahwa perguruan tinggi tersebut menjadi lokasi dengan tingkat permasalahan paling dominan dibandingkan perguruan tinggi mitra lainnya dalam pelaksanaan Program Beasiswa AMN Surabaya. Data tersebut menunjukkan bahwa di tengah berbagai manfaat yang disediakan seperti beasiswa pendidikan, bantuan biaya hidup, hunian asrama, program pembinaan, dan pendampingan akademik, masih ditemukan fenomena putus studi pada mahasiswa OAP yang menjadi salah satu kelompok sasaran utama program.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara penulis bersama Bapak Andika Kyo Putra, S.P., M.P. selaku Manajer Kepengasuhan Asrama Mahasiswa Nusantara (AMN) Surabaya, diketahui bahwa tingginya angka putus studi mahasiswa Orang Asli Papua (OAP) di UPN "Veteran" Jawa Timur disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut meliputi mahasiswa yang mengundurkan diri, diberhentikan karena melakukan pelanggaran terhadap ketentuan program, serta mangkir dari

asrama. Meskipun demikian, hasil wawancara menunjukkan bahwa mayoritas mahasiswa OAP yang mengalami putus studi di UPN “Veteran” Jawa Timur disebabkan oleh tidak terpenuhinya standar akademik selama menjalani perkuliahan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa permasalahan akademik menjadi penyebab yang paling dominan dibandingkan faktor-faktor lainnya. Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh Bapak Andika Kyo Putra sebagai berikut:

> “Kalau yang di UPN ‘Veteran’ Jawa Timur, mahasiswa OAP yang mengalami putus studi penyebabnya bermacam-macam. Ada yang mengundurkan diri, ada yang diberhentikan karena pelanggaran aturan, dan ada juga yang mangkir dari asrama. Tetapi mayoritas penyebabnya berkaitan dengan hasil evaluasi akademik selama mereka menjalani perkuliahan, sehingga ada mahasiswa yang tidak dapat melanjutkan studi dalam Program AMN Surabaya.” (Hasil wawancara, 15 April 2026)

Dari hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa permasalahan akademik menjadi faktor dominan yang menyebabkan mahasiswa OAP mengalami putus studi di UPN “Veteran” Jawa Timur dalam Program AMN Surabaya. Meskipun program telah menyediakan berbagai dukungan seperti beasiswa pendidikan, bantuan biaya hidup, hunian asrama, program pembinaan, dan pendampingan akademik, pada kenyataannya masih terdapat mahasiswa yang mengalami kendala dalam memenuhi standar akademik selama perkuliahan. Selain faktor akademik, terdapat pula faktor lain seperti pengunduran diri, pelanggaran aturan program, serta ketidakhadiran atau mangkir dari asrama yang turut memengaruhi keberlanjutan studi mahasiswa OAP. Kondisi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Program AMN Surabaya masih menghadapi berbagai tantangan dalam mendukung keberhasilan studi mahasiswa OAP sehingga diperlukan evaluasi lebih lanjut

terhadap pelaksanaan Program AMN Surabaya, khususnya dalam mendukung keberlanjutan studi mahasiswa OAP di UPN “Veteran” Jawa Timur.

Berdasarkan fenomena permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, terdapat kesenjangan yang dapat dipetakan ke dalam dua aspek, yaitu gap teoritis dan gap praktis. Secara gap teoritis, kajian evaluasi kebijakan terhadap program beasiswa afirmatif yang ada sebelumnya, seperti evaluasi Program ADik di Papua Selatan (Mendila et al., 2025), KIP Kuliah di Universitas Negeri Surabaya (Sariri & Prabiwati, 2024), dan Beasiswa Sepuluh Sarjana Per Desa di Bojonegoro (Oktaviana & Rosdiana, 2025), umumnya menilai keberhasilan program dari sisi akses, ketepatan sasaran, dan kecukupan pembiayaan. Studi-studi tersebut belum mengaitkan hasil evaluasinya dengan keberlanjutan studi penerima, khususnya fenomena putus studi. Selain itu, objek kajiannya masih berupa program yang bertumpu pada bantuan pembiayaan, sedangkan program yang memadukan beasiswa, hunian asrama, dan pembinaan terintegrasi seperti AMN, yang baru beroperasi sejak 2022, belum banyak dikaji secara ilmiah. Berdasarkan penelusuran penulis, belum ditemukan penelitian yang menggunakan enam kriteria evaluasi kebijakan William N. Dunn (2018), yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas, dan ketepatan, untuk mengevaluasi Program Beasiswa AMN Surabaya dalam kaitannya dengan putus studi mahasiswa OAP. Penelitian ini mengisi kekosongan tersebut dengan menerapkan kerangka evaluasi kebijakan dari Willian N. Dunn (2018) pada program afirmasi berbasis asrama dan menempatkan putus studi sebagai fokus penilaian.

Secara gap praktis, terdapat jarak antara tujuan dan realita pelaksanaan program. Program AMN Surabaya dirancang secara komprehensif melalui beasiswa pendidikan, dana bulanan, hunian asrama, serta pembinaan dan pendampingan akademik agar mahasiswa OAP dapat menyelesaikan studinya. Namun, data Asrama Mahasiswa Nusantara (AMN) Surabaya (2025) yang penulis peroleh menunjukkan bahwa dari 281 mahasiswa OAP penerima program periode 2022-2025, sebanyak 68 mahasiswa mengalami putus studi. Sebanyak 37 mahasiswa di antaranya, atau sekitar 54%, berasal dari UPN "Veteran" Jawa Timur, jumlah tertinggi dibandingkan perguruan tinggi mitra lainnya. Hasil wawancara dengan Manajer Kepengasuhan AMN Surabaya menunjukkan bahwa penyebab dominannya adalah tidak terpenuhinya standar akademik, meskipun dukungan program sudah tersedia. Kondisi ini menunjukkan bahwa belum ada evaluasi yang secara sistematis menilai bagian mana dari rancangan dan pelaksanaan program yang belum mampu menekan putus studi. Padahal, pengelola dan pemerintah membutuhkan hasil evaluasi tersebut sebagai dasar perbaikan program dan rekomendasi kebijakan.

Oleh karena itu, penulis tertarik melakukan penelitian mengenai evaluasi Program Beasiswa Asrama Mahasiswa Nusantara (AMN) Surabaya terhadap fenomena putus studi mahasiswa Orang Asli Papua (OAP) di UPN "Veteran" Jawa Timur dengan menggunakan teori evaluasi kebijakan William N. Dunn (2018). Teori ini dinilai relevan karena enam kriterianya mampu menilai program dari sisi hasil, pemanfaatan sumber daya, pemenuhan kebutuhan, keadilan distribusi, tanggapan sasaran, dan kesesuaian program. UPN "Veteran" Jawa Timur dipilih

karena mencatat jumlah putus studi mahasiswa OAP tertinggi di antara perguruan tinggi mitra. Penelitian ini diharapkan berkontribusi secara akademik sekaligus menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah dan pengelola program dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan program serta menghasilkan rekomendasi kebijakan yang mendukung keberhasilan studi mahasiswa OAP secara berkelanjutan. Atas dasar tersebut, penulis mengangkat judul **"Evaluasi Program Beasiswa Asrama Mahasiswa Nusantara (AMN) Surabaya terhadap Fenomena Putus Studi Mahasiswa Orang Asli Papua (OAP) di UPN "Veteran" Jawa Timur"**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis merumuskan permasalahan yang akan dikaji adalah "Bagaimana Evaluasi Program Beasiswa Asrama Mahasiswa Nusantara (AMN) Surabaya terhadap Fenomena Putus Studi Mahasiswa Orang Asli Papua (OAP) di UPN "Veteran" Jawa Timur?".

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk memahami, menganalisis, dan mendeskripsikan sejauh mana Evaluasi Program Beasiswa Asrama Mahasiswa Nusantara (AMN) Surabaya terhadap Fenomena Putus Studi Mahasiswa Orang Asli Papua (OAP) di UPN "Veteran" Jawa Timur.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini dirancang untuk memberikan dorongan bagi perkembangan ilmu pengetahuan terutama dalam bidang administrasi publik yang berkaitan

dengan evaluasi kebijakan publik. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan agar dapat menjadi sumber referensi atau acuan untuk penelitian selanjutnya, khususnya yang berfokus pada evaluasi program beasiswa Asrama Mahasiswa Nusantara (AMN) Surabaya terhadap fenomena putus studi mahasiswa Orang Asli Papua (OAP) di UPN "Veteran" Jawa Timur.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. **Bagi Penulis**

   Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya wawasan dan pengetahuan akademis penulis mengenai penerapan teori evaluasi kebijakan dalam setting empiris, khususnya dalam menganalisis Program Beasiswa Asrama Mahasiswa Nusantara (AMN) Surabaya, sekaligus menyediakan pengalaman berharga untuk mengasah kemampuan analisis kritis terhadap kebijakan publik serta pemahaman mengenai faktor-faktor yang menentukan keberhasilan atau kegagalan suatu program.

2. **Bagi Asrama Mahasiswa Nusantara (AMN) Surabaya**

   Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan positif melalui masukan yang bersifat konstruktif sebagai dasar evaluasi bagi pengelola Program AMN Surabaya guna mengukur capaian tujuan program, terutama dalam menekan angka putus studi mahasiswa OAP, serta menyajikan rekomendasi untuk meningkatkan mutu pelaksanaan program secara keseluruhan dari aspek pembinaan, pendampingan, dan pengelolaan.

3. **Bagi Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur**

   Penelitian ini memiliki potensi sebagai sumber referensi akademik tambahan yang relevan sekaligus bahan pertimbangan strategis bagi Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur selaku perguruan tinggi mitra Program AMN Surabaya, khususnya untuk memahami dinamika serta tantangan yang dialami mahasiswa OAP selama menempuh pendidikan tinggi, sehingga dapat menyusun kebijakan akademik dan layanan pendukung yang paling tepat guna mendukung keberhasilan studi mereka.